

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PEMBINAAN KARANG TARUNA TUNAS JAYA OLEH
KEPALA DESA DI DESA SUNGAI KUTI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Dewi Puspita Simanjuntak

NPM :167110140

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas
Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Publik

Pembimbing


Lilis Suriani, S.Sos, M.Si


Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas
Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

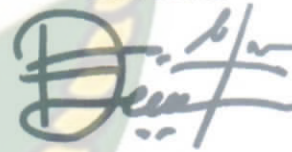
Pekanbaru, 07 Desember 2020

Ketua



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA

Sekretaris



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Anggota



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1205/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
N P M : 167110140
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa Di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Struktur Tim :

1. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 November 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1205/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 25 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 26 November 2020 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa Di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu**
Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Ketua	1. 
2.	Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 26 November 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: /A_UIR/FS-5/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
Persentase Plagiasi : 14 % (72 Halaman)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Nov 2020

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas
Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti
Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten
Rokan Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 Desember 2020
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA



Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Publik



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah tabaraka ta'ala yang mana telah memberikan saya nikmat kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan dalam menyusun karya ilmiah ini, Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.**

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan serta memberikan ilmu pengetahuan dan penulis sangat terbantu dalam penyelesaian skripsi ini sekaligus Anggota Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan perbaikan yang sangat membangun sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.

4. Bapak Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Ibu Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan perbaikan yang sangat membangun sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
7. Karyawan dan Pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mempelancar dan membantu proses administrasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orangtua beserta keluarga besar yang senantiasa mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh anggota Karang Taruna Tunas Jaya Desa Sungai Kuti yang telah memberikan bantuan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang membantu peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 07 Desember 2020
Peneliti,

Dewi Puspita Simanjutak

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
SK. TIM PENGUJI DAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan	11
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	11
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	13
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	15
4. Konsep Pembinaan Organisasi.....	17
5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan	19
6. Konsep Karang Taruna	20
B. Kerangka Pikir.....	23
C. Hipotesis	25
D. Konsep Operasional.....	25
E. Operasionalisasi Variabel.....	29
F. Teknik Pengukuran	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Teknik Penarikan Sampel	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Karang Taruna Tunas Jaya	39
1. Sejarah Karang Taruna Tunas Jaya	39
2. Daftar Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya	41
3. Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya	42
4. Tupoksi Jabatan Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya.....	42
B. Gambaran Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	49
1. Geografis Desa Sungai Kuti.....	49
2. Kependudukan Desa Sungai Kuti	50
3. Sosial Desa Sungai Kuti	51
4. Kemasyarakatan Desa Sungai Kuti	52
5. Pemerintahan Desa Sungai Kuti	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Identitas Responden	55
1. Jenis Kelamin Responden	55
2. Usia Responden	56
3. Pendidikan Responden	56
B. Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	57
1. Indikator Penyadaran	58
2. Indikator Transformasi	63
3. Indikator Peningkatan	70
4. Rekapitulasi Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	70
C. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ...	79
1. Keterbatasan Anggaran	81
2. Rendahnya Partisipasi Pemuda dan Pemudi Desa Sungai Kuti	81
3. Efek Pandemi Covid19	82
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya Tahun 2015 – 2020.....	5
II.1 : Konsep Operasional Peranan Kepala Desa Dalam Membina Karang Taruna Tunas Jaya di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	29
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .	34
IV.1 : Daftar Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya Tahun 2019.....	41
IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	50
IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Sungai Kuti Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2019	51
IV.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jumlah Bangunan Tahun 2019	52
IV.5 : Jumlah Kelompok Organisasi di Desa Sungai Kuti Berdasarkan Bidang Tahun 2019.....	53
IV.6 : Pemerintahan Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jabatan Tahun 2019.....	54
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden	55
V.2 : Distribusi Usia Responden.....	56
V.3 : Distribusi Pendidikan Responden.....	57
V.4 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Pembentukan Perilaku Sadar.....	60
V.5 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Peduli	61
V.6 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Peningkatan Kapasitas Diri	62
V.7 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Wawasan Pengetahuan.....	65
V.8 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Kecakapan.....	67
V.9 : Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Keterampilan Dasar	68

V.10	: Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Berperan Dalam Pembangunan.....	69
V.11	: Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Inisiatif.....	73
V.12	: Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Inovatif	74
V.13	: Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Kemandirian.....	75
V.14	: Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Pengembangan.....	76
V.15	: Rekapitulasi Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
I.1	: Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya.....	4
II.1	: Kerangka Pikir Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu .	24
IV.1	: Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya.....	42
IV.2	: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Kuti	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner	88
2. Daftar Wawancara.....	93
3. Deskripsi Responden	95
4. Hasil Jawaban Kuisisioner	96
5. AD/ART Karang Taruna Tunas Jaya 2018-2021	97
6. Dokumentasi Penelitian.....	110
7. Surat Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 2790/E-UIR/27-FS/2020 Tentang : Mohon Rekomendasi Riset	114
8. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/Non Izin-Riset/ 189 Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	115
9. Surat Pemerintah Desa Sungai Kuti, Nomor: 140/Pem-Sk/IX/2020/493 tentang Mengijinkan Untuk Penelitian	116

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Puspita Simanjutak
NPM : 167110140
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul skripsi : Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,



Dewi Puspita Simanjutak

**ANALISIS PEMBINAAN KARANG TARUNA TUNAS JAYA OLEH
KEPALA DESA DI DESA SUNGAI KUTI KECAMATAN KUNTO
DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh:

**Dewi Puspita Simanjuntak
NPM : 167110140**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu beserta faktor penghambat dan rekomendasi atau saran yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada Anggota Karang Taruna Tunas Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan hanya mendapatkan persentase sebesar 44,1% tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena masih adanya aspek Kepala Desa yang belum optimal yaitu pembentukan perilaku sadar, peduli, peningkatan kapasitas diri, kecakapan, berperan dalam pembangunan, inisiatif, inovatif, dan pengembangan. (2) Faktor penghambat dalam pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi pemuda dan pemudi Desa Sungai Kuti dan Efek pandemi Covid19. Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya peningkatan prioritas penggunaan ADD untuk kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya dan perlu adanya peningkatan partisipasi pemuda dan pemudi di Desa Sungai Kuti.

Kata Kunci: Pembinaan, Kepala Desa, Karang Taruna

**AN ANALYSIS OF TUNAS JAYA YOUTH LOCAL ORGANIZATION
GUIDANCE BY VILLAGE HEAD IN THE SUNGAI KUTI VILLAGE
KUNTO DARUSSALAM SUBDISTRICT ROKAN HULU
DISTRICT**

By:

Dewi Puspita Simanjuntak
NPM: 167110140

ABSTRACT

This study aims to determine the guidance of the Tunas Jaya Youth Local Organization by the Village Head in Sungai Kuti Village, Kunto Darussalam Subdistrict, Rokan Hulu District along with the inhibiting factors and recommendations or suggestions that can be given. This study used a quantitative descriptive method by giving a questionnaire to the members of the Tunas Jaya Youth Local Organization. The results showed that: (1) The Tunas Jaya Youth Local Organization Guidance by Village Head in the Sungai Kuti Village, Kunto Darussalam Subdistrict, Rokan Hulu District as a whole, only got a percentage of 44,1% which was less effective. The reason because there are still aspects of the Village Head that are not yet optimal, namely the formation of conscious, caring behavior, increasing self-capacity, skills, playing a role in development, initiative, innovation, and development. (2) The inhibiting factors in the guidance of the Tunas Jaya Youth Local Organization by the Village Head in Sungai Kuti Village, Kunto Darussalam Subdistrict, Rokan Hulu District consisted of budget constraints, low participation of youth and young women in Sungai Kuti Village and the effect of the pandemic Covid19. Recommendations or suggestions that can be given are that there is a need to increase the priority of ADD used for the Tunas Jaya Youth Local Organization by Village Head and there is a need for increased participation of youth and young women in Sungai Kuti Village.

Keywords: Guidance, Village Head, Youth Local Organization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik dalam pemerintahan desa sangat penting untuk diperhatikan, hal ini disebabkan karena berkaitan dengan administrasi desa secara keseluruhan, mulai dari administrasi pembangunan, dan administrasi pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Syafiie (2010:15) yang mengemukakan administrasi dalam arti luas yaitu kerjasama banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Potensi masyarakat pedesaan secara bersama perlu didukung sistem pemerintahan dan penggerak pembangunan pedesaan. Secara formal perlu dukungan organisasi yang terdiri dari pemerintah desa guna membangun pengembangan potensi berbagai dinas dari bawah. Oleh karena itu organisasi kemasyarakatan di desa merupakan aset penting yang perlu dijaga.

Pentingnya pembinaan organisasi desa sangat mempengaruhi proses pembangunan desa melalui berbagai fungsi yang sangat penting. Lembaga desa juga dapat berperan sebagai agitator untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran ini sangat penting, jika struktur ekonomi dan masyarakat desa berubah maka tindakan tersebut tampaknya menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai bagian dari strategi dan rencana pembangunan desa. (Winarno, 2013:109).

Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu desa dari 10 desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Kunto Darussalam memiliki luas 1.145 m² dengan jumlah 10 RT dan 5 RW memiliki jumlah total penduduk 2.005 jiwa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini juga mempertegas kembali peran salah satu lembaga kesejahteraan masyarakat yaitu Karang Taruna.

Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna mendefinisikan Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan masyarakat, wadah, serta sarana pembinaan bagi setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kepedulian dan tanggung jawab sosial baik generasi muda di pedesaan / kelurahan, terutama di bidang kesejahteraan sosial.

Karang Taruna di Desa Sungai Kuti awal pertama didirikan pada tahun 1988 dan mulai kembali dibangkitkan dari awal kembali pada tanggal 20 juli 2018 dengan dinamakan lembaga Karang Taruna “Tunas Jaya” Desa Sungai Kuti. Adapun sifat Karang Taruna Tunas Jaya adalah organisasi sosial generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pasal 38 ayat 1 adalah sebagai pembina umum. Dalam Permensos Nomor: 77/ HUK / 2010 pasal 16 ayat 2 dikatakan Kepala Desa berperan sebagai pembina umum, bertugas:

- 1) Melakukan pembinaan umum di desa/ kelurahan.
- 2) Mengkukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/ kelurahan
- 3) Memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/ kelurahan

Berdasarkan AD/ART Karang Taruna Tunas Jaya 2018-2021 Bab II struktur organisasi pasal 4 menunjuk Kepala Desa sebagai pembina yang bertugas:

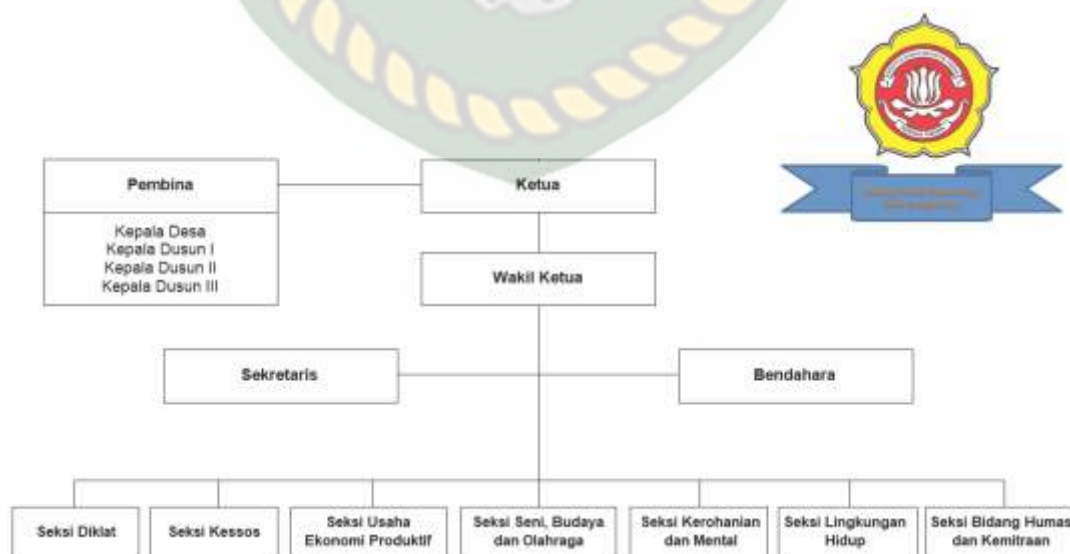
- 1) Bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan kebijakan Karang Taruna Tunas Jaya.
- 2) Bertugas menetapkan struktur kepengurusan Karang Taruna Tunas Jaya.

Selanjutnya AD/ART Karang Taruna Tunas Jaya 2018-2021 Bab II struktur organisasi pasal 5 tentang pembina menyebutkan bahwa:

- 1) Pembina adalah orang yang ditunjuk atau diusulkan oleh Ketua Karang Taruna Tunas Jaya terdiri dari Kepala Desa, Ketua Dusun I, Ketua Dusun II dan Ketua Dusun III.
- 2) Pembina Karang Taruna Tunas Jaya berjumlah 4 orang.
- 3) Pembina bertugas untuk :
 - a) Menampung aspirasi anggota dan masyarakat.
 - b) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus Karang Taruna Tunas Jaya.
 - c) Menjalankan fungsi kontrol kepada pengurus Karang Taruna Tunas Jaya.

Karang Taruna Tunas Jaya memiliki tugas bersama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya, memikul tugas utama membangun generasi muda dan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Karang Taruna Tunas Jaya mempunyai fungsi untuk mencegah timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat khususnya generasi muda. Melaksanakan kesejahteraan sosial bagi setiap anggota masyarakat, khususnya generasi muda, meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelatihan.. Meningkatkan bisnis ekonomi produktif. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal. Menjaga dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar I.1. Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya



Sumber: Karang Taruna Tunas Jaya, 2020

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa struktur organisasi Karang Taruna Tunas Jaya sesuai dengan Permensos Nomor 77 Tahun 2010 bab IV tentang keorganisasian, keanggotaan dan kepengurusan pasal 10 ayat (3). Selanjutnya beberapa daftar kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1. Daftar Kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya Tahun 2015 – 2020

No. (1)	Daftar Kegiatan (2)	Tahun (3)
1	Tasyakuran HUT RI Ke-70	2015
2	Sosialisasi dan Presentasi Asuransi Jiwa	2015
3	Pembentukan tim sukses	2015
4	Sosialisasi Anarkisme, radikalisme, dan terorisme	2016
5	Turnamen bola volly	2016
6	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa	2016
7	Pembentukan seksi kepengurusan	2018
8	Wirid mingguan	-
9	Tasyakuran HUT RI Ke-75	-

Sumber: Kantor Desa Sungai Kutu, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa di tahun 2015 terdapat kegiatan Tasyakuran HUT RI Ke-70, Sosialisasi dan Presentasi Asuransi Jiwa dan Pembentukan tim sukses. Pada tahun 2016 terdapat Sosialisasi Anarkisme, radikalisme, dan terorisme, turnamen bola volly dan penetapan bakal calon kepala desa. Di tahun 2017 tidak ada kegiatan sama sekali, dan di tahun 2018 terdapat kegiatan pembentukan seksi kepengurusan karang taruna yang baru. Di tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada kegiatan sama sekali karena wirid mingguan yang sepi akibat wabah covid 19 dan juga perencanaan Tasyakuran HUT RI Ke-75 juga tidak dapat dilakukan.

Mengingat pentingnya fungsi dan tugas Karang Taruna dalam suatu wilayah atau daerah, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi keberadaan Karang Taruna, sebab kinerja Karang Taruna merupakan salah satu parameter yang tidak bisa dipisahkan lagi untuk menilai keberhasilan Pemerintah Desa.

Menurut Widjopranoto (2012:45) pembinaan Karang Taruna oleh kepala desa, sangat diperlukan untuk menghindari kepentingan pribadi dan organisasi, oleh karena itu perlu dicantumkan tugas pembinaan yaitu meningkatkan disiplin dan motivasi yang pada akhirnya menjadi perlu untuk mempertahankan apa yang diperoleh melalui berbagai perbaikan menjadi lebih baik. Dengan mengacu pada pendapat ahli di atas, maka jika diberikan penjelasan lebih lanjut, maka pelatih didasarkan pada kondisi standar dan memiliki karakteristik yang berlaku untuk seluruh tim.

Kurang dinamisnya kegiatan Karang Taruna yang ada di Desa tentu tidak terlepasnya oleh pembinaan yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai pejabat yang diberi otoritas untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan terhadap Karang Taruna ditemukan beberapa fenomena yang menjadi acuan peneliti untuk melanjutkan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dari awal berdiri Karang Taruna Tunas Jaya tidak berjalan lancar.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan, terjadi kefakuman sehingga kurang memberikan efek terhadap kinerja pemerintah di desa meskipun di tahun 2018 sudah dibentuk kepengurusan yang baru. Penyebab kefakuman ini adalah disebabkan

karena rendahnya intensitas pembinaan yang dilakukan, keterbatasan anggaran desa untuk operasional karang taruna, ketidakjelasan program yang akan dijalankan, serta rendahnya partisipasi pemuda dan pemudi.

- 2) Belum adanya upaya serius dari Karang Taruna Tunas Jaya dalam menghasilkan dan mengembangkan kegiatan generasi pemuda di lingkungannya, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi pemuda dalam aktivitas Karang Taruna Desa dan di tahun 2018 saat pembentukan penunjukan seksi karang taruna yang baru banyak generasi pemuda yang menolak ketika ditunjuk dan tidak ada antusiasme untuk mengajukan dirinya sendiri menjadi keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya.
- 3) Kondisi pengembangan organisasi berjalan sangat lambat, hampir tidak aktif dan kurang diminati. Hal ini dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada perencanaan kegiatan sama sekali.
- 4) Terkesan belum adanya kesadaran dan rasa memiliki para pemuda terhadap organisasi Karang Taruna sehingga mereka lebih banyak bersikap acuh dan apatis.
- 5) Pembinaan yang sudah teralisasi adalah sosialisasi dan presentasi asuransi jiwa di tahun 2015 dan sosialisasi anarkisme, radikalisme, dan terorisme di tahun 2016 dan hingga saat ini tidak ada lagi pembinaan yang dilakukan. Kurangnya pembinaan oleh Kepala Desa terkait sosialisasi untuk pengembangan Karang Taruna tentang

program-program yang akan dijalankan, sehingga banyak anggota yang tidak mengetahui program apa yang dijalankan oleh pihak Karang Taruna dengan alasan tidak ada dana. Padahal sesuai dokumentasi AD/ART Karang Taruna Tunas Jaya 2018-2021 Bab VIII tentang keuangan pasal 13 menyebutkan keuangan Karang Taruna Tunas Jaya berasal dari iuran anggota karang taruna, usaha sendiri yang diperoleh secara syah, bantuan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan/ subsidi dari pemerintah dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik memfokuskan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas maka yang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

2. Apa faktor penghambat dalam pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademis, bagi mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana kepala desa dalam membina Karang Taruna, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperhatikan masalah khususnya pembinaan karang taruna oleh kepala desa.
- b. Manfaat praktis, pengambilan kebijakan dan keputusan mengenai peranan kepala desa dalam membina Karang Taruna agar sesuai dengan kondisi dalam pelaksanaannya serta dapat mengatasi

masalah-masalah dalam mendorong berkembangnya kegiatan sosial masyarakat.

- c. Manfaat teoritis, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini baik dengan pendekatan penelitian yang sama tapi objek berbeda, ataupun penggunaan objek yang sama dengan pendekatan penelitian yang berbeda.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi secara harfiah berasal dari “*ad*” dan “*ministrase*” yang artinya mengelola, mengurus, memelihara, mengendalikan, dan memerintah. Administrasi adalah cabang penelitian ilmu sosial yang mencakup seluruh proses banyak orang dalam suatu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang dicapai sebelumnya (Kartono, 2016:13). Menurut Siagian (2015:5) Administrasi adalah proses pelaksanaan suatu keputusan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Syafiie (2010:15) administrasi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu kerjasama banyak orang untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-sehari yaitu kegiatan tata usaha. Menurut Gie (dalam Susiani, 2019:1) administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam administrasi melibatkan proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Oleh sebab itu dalam administrasi melibatkan tiga unsur pokok yaitu kegiatan melibatkan dua

orang atau lebih, kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan ada tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Zulkifli (2014:12) berpendapat terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi, yaitu :

- a. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
- b. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut.
- c. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan berarti merupakan konsep baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal peradaban.

Menurut Susiani (2019:11) administrasi publik mempunyai peran yang sangat terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik ini lebih banyak ditekankan pada fungsi implementasi kebijakan publik. Menurut Pfiffner dan Presthus (dalam Syafiiie 2010:25) administrasi publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan

Litchfield (dalam Syaffie 2010:25) administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Wirman (2012:21) urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan adanya administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/ swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan administrasi suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan administrasi publik adalah koordinasi badan pemerintahan yang diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Konsep dan teori organisasi sangat signifikan dikemukakan dalam karya ilmiah, pertama berkaitan dengan relevansi teori administrasi publik, kedua secara praktis teori ini berkaitan dengan mekanisme dan gerak organisasi khususnya organisasi pemerintah desa.

Menurut Simon (dalam Syafiie, 2010:51) organisasi merupakan model komunikasi yang lengkap serta hubungan-hubungan lain didalam suatu

kelompok orang-orang. Siagian (2012:6) berpendapat bahwa organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan menurut Zulkifli (2015:99) organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.

Menurut Duha (2018:2) organisasi adalah sebuah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang mempunyai sedikit atau banyak kesamaan terkait latar belakang, identitas, harapan dan banyak hal lain yang bertujuan mencapai kesepakatan secara bersama. Selanjutnya William G. Scott (dalam Kartono 2016:13) memberikan uraian mengenai organisasi yaitu organisasi formal merupakan sistem kegiatan-kegiatan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama secara bersama-sama menuju kearah tujuan bersama dibawah kewenangan dan kepemimpinan.

Fahmi (2013:1) memandang organisasi publik sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Menurut Wibowo (2016:2) organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya. Menurut Karyoto (2016:29)

organisasi publik mencakup berbagai elemen yang terdiri dari tujuan yang ingin dicapai, pekerjaan, sumber daya dan lokasi yang memadai.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan organisasi publik adalah salah satu tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut Karyoto (2016:1) manajemen berasal dari kata *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola sedangkan *man* bermakna manusia. Sehingga manajemen merupakan salah satu unsur sumber daya selain uang, material, alat, metode dan pemasaran yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Manullang (dalam Ratminto, 2016:1) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian John D. Millet (dalam Syafiie, 2010:49) juga berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses pemberian arahan kepada bawahan yang telah terorganisasi dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuan.

Sedangkan Zulkifli (2015:5) berpendapat manajemen adalah koordniasi semua sumberdaya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara itu Siagian (2015:5) menjelaskan manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalaui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Terry (2016:9) manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Gie (dalam Zulkifli, 2014:68) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.

Manajemen publik memiliki definisi yang beragam, diantaranya menurut Graham dan Hays (dalam Rakhmat, 2018:107) manajemen publik adalah aspek administrasi pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggungjawab, dan pencapaian hasil. Sementara itu dari sumber yang sama Sharitz (dalam Rakhmat 2018:107) menjelaskan bahwa manajemen publik adalah aplikasi ilmu dan seni pengetahuan manajemen terhadap suatu konteks dimana berbagai nilai turut menentukan hasil

penilaian suatu keberhasilan dan dimana aturan ikut berpengaruh terhadap hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan administratif. Menurut Tangkilisan (2005:11) manajemen publik umumnya mengarah pada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Sedangkan manajemen publik adalah aspek administrasi pemerintahan yang mempunyai kaitan dengan efisiensi, tanggungjawab, dan pencapaian hasil dalam ruang lingkup organisasi publik.

4. Konsep Pembinaan Organisasi

Menurut Thoha (2014:207) yang dimaksud dengan pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau perbuatan untuk menjadikan lebih baik, adanya kata pembinaan menurut ahli tersebut mengandung dua arti penilaian dimana sebuah pembinaan dapat dikatakan sebagai upaya proses dari tujuan dan perspektif lain pembinaan dikatakan sebagai tindakan perbaikan. Dari sisi lain pembinaan dikatakan sebagai tindakan perbaikan bila mana tim binaan tidak dapat mencapai tujuan organisasi.

Pembinaan organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu usaha yang terencana dan menopang untuk menerapkan ilmu perilaku bagi suatu sistem penyempurnaan, penggunaan teknik yang reflektif, dan metode analisis diri (Lippitt, 2007:71). Menurut Sinambela (2016:18) pembinaan

organisasi adalah suatu usaha yang terencana, meliputi semua aspek organisasi, diatur dari atas, meningkatkan efektivitas, kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku.

Menurut Sumodiningrat (2009:56) pembinaan melalui suatu masa proses belajar hingga mampu mencapai status mandiri. Proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Selanjutnya Ndraha (2013:168) mengatakan bahwa pembinaan lembaga kemasyarakatan berarti usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka penataan kembali pranata atau lembaga masyarakat, dan pengarahannya tingkah laku masyarakat dan pengisian mental anggota lembaga masyarakat dengan budaya tradisional, sementara itu untuk melaksanakan suatu pembinaan maka harus meliputi:

- a. Pendidikan

- b. Latihan
- c. Lokakarya (*workshop*)
- d. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya)
- e. Penerangan
- f. Pertemuan, diskusi, musyawarah
- g. Pers, radio dan TV
- h. Literatur dan sebagainya
- i. Intruksi-intruksi teladan
- j. Intruksi-intruksi

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, mendefinisikan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa pasal 5 LKD memiliki fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa pasal 6 LKD memiliki jenis:

- a. Rukun Tetangga (RT)
- b. Rukun Warga (RW)
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- d. Karang Taruna
- e. Pos Pelayanan Terpadu, dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

6. Konsep Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna mendefinisikan Karang Taruna adalah

organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa/ Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Landasan Hukum Karang Taruna sebagai berikut:

- Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah tertanggal 15 Maret 2015.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa tertanggal 30 Desember 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan tertanggal 30 Desember 2005.
- Permendagri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga tertanggal 5 Februari 2007.
- Permensos RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna

- Permensos RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna

Menurut Direktorat Bina Karang Taruna (2005:2) menyebutkan fungsi

Karang Taruna sebagai berikut:

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, menyebutkan kegiatan taruna meliputi bidang pendidikan, bidang pelatihan dan penyuluhan, bidang usaha kesejahteraan sosial, bidang pengabdian masyarakat, bidang keuangan dan kewirausahaan, bidang kerohanian dan pembinaan mental, bidang olahraga dan seni budaya, bidang lingkungan hidup, bidang hubungan masyarakat.

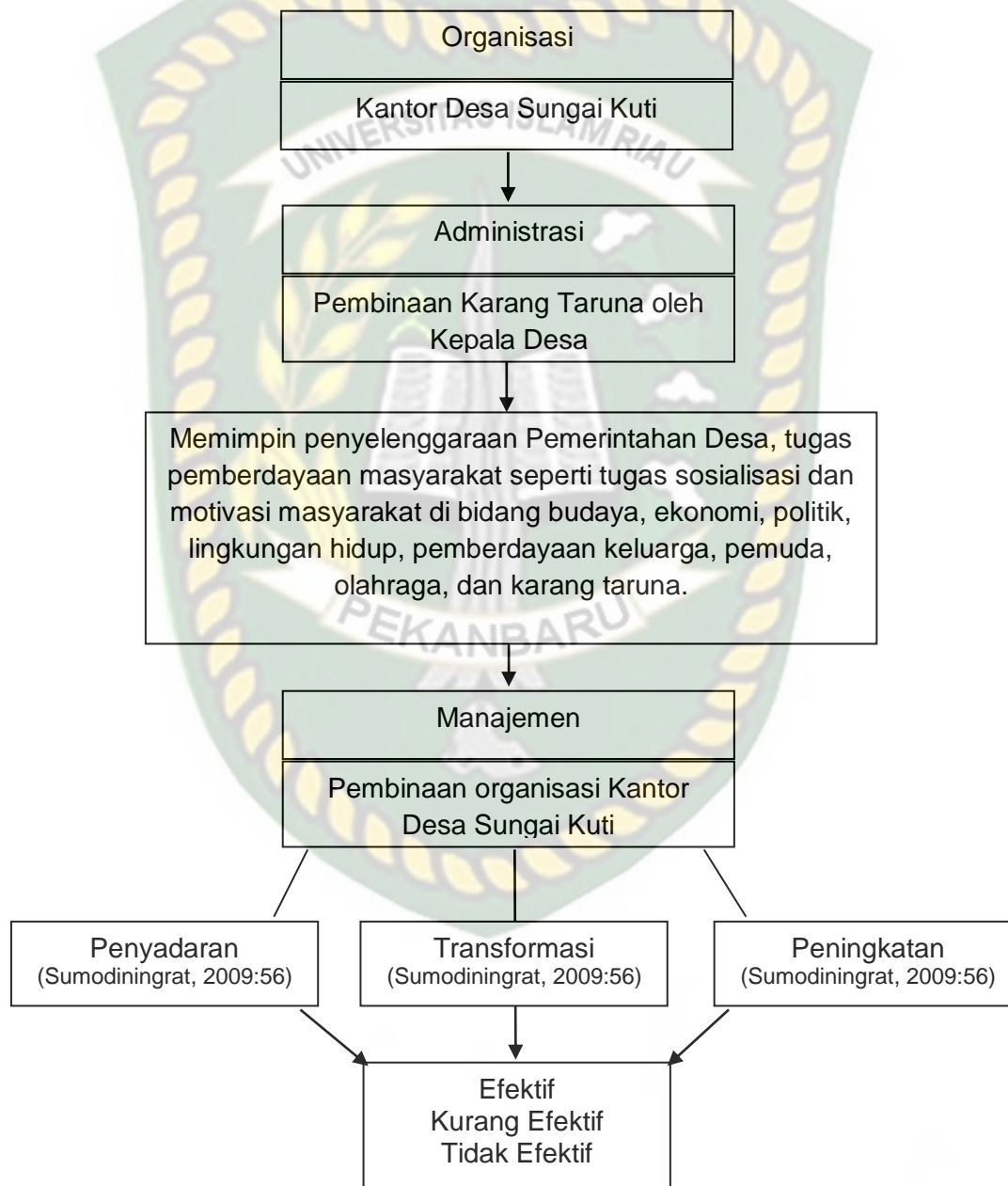
B. Kerangka Pikir

Berdasarkan Permensos RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Karang Taruna, Bab VII pasal 38 poin (2) huruf e bertugas 1) melakukan pembinaan umum di desa/ kelurahan dan 3) memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/ kelurahan.

Selanjutnya pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan Pengurus Karang Taruna yang dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna di desa

atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis setempat.

Gambar II.1. Kerangka Pikir Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

C. Hipotesis

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu kurang efektif.

D. Konsep Operasional

Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Administrasi adalah suatu proses pelaksanaan dari sebuah keputusan yang diambil yang pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Administasi Publik merupakan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
3. Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan yang mana terdapat sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. Organisasi publik adalah organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.
5. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

6. Manajemen publik adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan Negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh Negara.
7. Lembaga kemasyarakatan desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa berdasarkan prinsip-prinsip kesukarelaan, yaitu rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.
8. Pembinaan adalah merupakan pencapaian yang lebih baik. Yang diukur dengan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi dan perubahan kognitif.
9. Karang Taruna Tunas Jaya adalah organisasi sosial kemasyarakatan di Desa Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
10. Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa masa jabatan kepala desa enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

11. Penyesadaran adalah tahap pertama dari pembinaan yang meliputi pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri.
 - a) Pembentukan perilaku sadar berkaitan dengan nasihat maupun saran yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan serta intensitas pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan.
 - b) Peduli merupakan sikap keberpihakan pimpinan kepada bawahan serta melibatkan berbagai bentuk perhatian.
 - c) Peningkatan kapasitas diri adalah upaya yang dilakukan pimpinan untuk memberikan pelatihan demi meningkatkan kompetensi bawahannya serta pembentukan program yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.
12. Transformasi adalah tahap kedua dari pembinaan yang meliputi wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, dan berperan dalam pembangunan.
 - a) Wawasan pengetahuan berkaitan dengan fasilitas yang disediakan pimpinan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan kerja para bawahannya.
 - b) Kecakapan adalah kepandaian yang dimiliki seseorang atau kemahiran pimpinan dalam mengkoordinasikan serta komunikasi yang efektif.

- c) Keterampilan dasar berkaitan dengan penilaian tingkat seluruh elemen organisasi yang berkaitan dengan kinerja dari program-program organisasi itu sendiri.
 - d) Berperan dalam pembangunan merupakan kontribusi pimpinan dalam membangun kegiatan organisasi itu sendiri, hal tersebut juga menjadi salah satu penilaian efektivitas pembinaan pemimpin secara keseluruhan.
13. Peningkatan adalah tahap akhir dari pembinaan yang meliputi inisiatif, inovatif, kemandirian dan pengembangan.
- a) Inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal.
 - b) Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan kegiatan nyata yang baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
 - c) Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah secara independen.

- d) Pengembangan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual dan kapabilitas dalam meningkatkan kinerja organisasi.

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 : Konsep Operasional Analisis Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan melalui suatu masa proses belajar hingga mampu mencapai status mandiri. Proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. (Sumodiningrat, 2009:56)	Pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa	Penyadaran	- Pembentukan perilaku sadar - Peduli - Peningkatan kapasitas diri	Efektif Kurang Efektif Tidak efektif
		Transformasi	- Wawasan pengetahuan - Kecakapan - Keterampilan dasar - Berperan dalam pembangunan	Efektif Kurang Efektif Tidak efektif
		Peningkatan	- Inisiatif - Inovatif - Kemandirian - Pengembangan	Efektif Kurang Efektif Tidak efektif

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu efektif, Tidak Efektif, tidak efektif. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan presentase. Untuk lebih memudahkan dalam

memahami kategori ukuran tersebut penulis akan menjelaskan yaitu sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket : P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

Selanjutnya adalah untuk menentukan kriteria yang didapatkan dari keseluruhan indikator adalah dengan menggunakan perhitungan:

2. Penysadaran menurut Sumodiningrat (2009:56) adalah tahap pertama dari pembinaan yang meliputi pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri.

Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri mendapatkan skor 67-100%

Kurang Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri mendapatkan skor 34-66%

Tidak efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri mendapatkan skor 1-33%

3. Transformasi menurut Sumodiningrat (2009:56) adalah tahap kedua dari pembinaan yang meliputi wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, dan berperan dalam pembangunan.

Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, berperan dalam pembangunan mendapatkan skor 67-100%

Kurang Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, berperan dalam pembangunan mendapatkan skor 34-66%

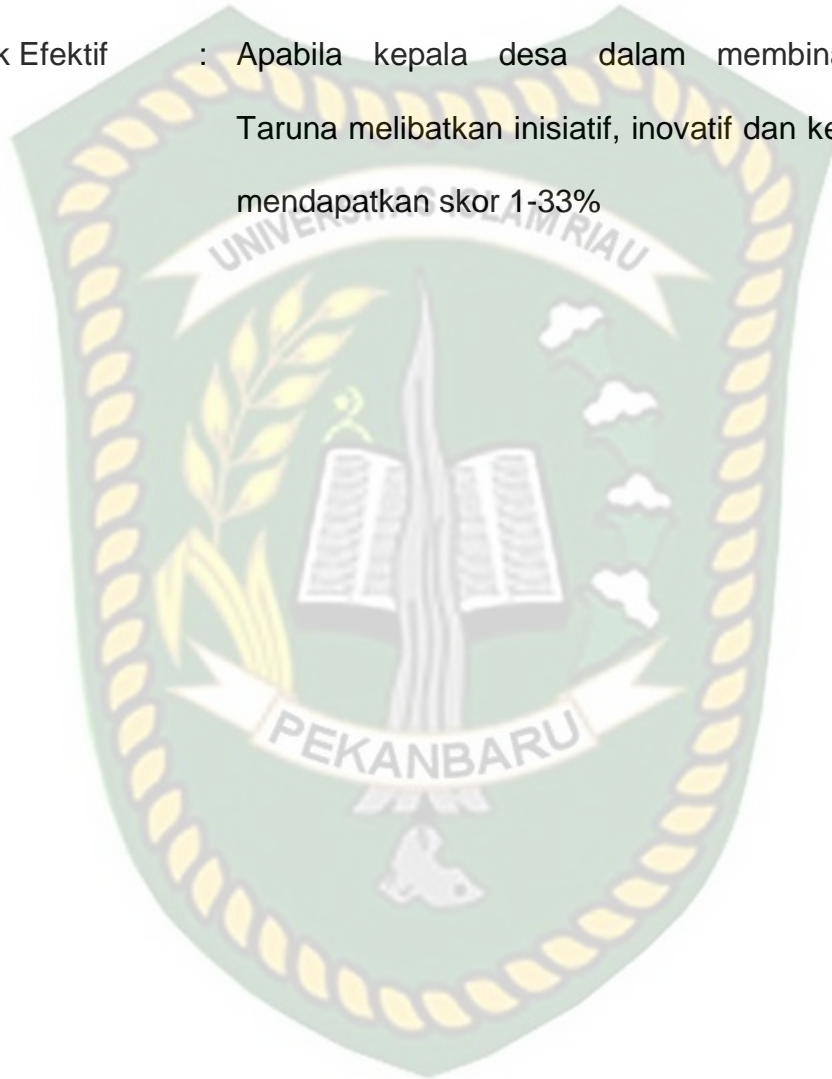
Tidak Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, berperan dalam pembangunan mendapatkan skor 1-33%

4. Peningkatan menurut Sumodiningrat (2009:56) adalah tahap akhir dari pembinaan yang meliputi inisiatif, inovatif, kemandirian dan pengembangan.

Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan inisiatif, inovatif dan kemandirian mendapatkan skor 67-100%

Kurang Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan inisiatif, inovatif dan kemandirian mendapatkan skor 34-66%

Tidak Efektif : Apabila kepala desa dalam membina Karang Taruna melibatkan inisiatif, inovatif dan kemandirian mendapatkan skor 1-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah campuran. Menurut Creswell (2010:5) metode penelitian campuran (mixed) adalah pendekatan penelitian yang menggabung antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kelebihan dari tipe ini adalah hasil data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Terdapat 3 strategi dalam metode campuran, peneliti menggunakan strategi eksplanatoris sekuensial yaitu tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti oleh pengumpulan dan menganalisis data berbentuk kualitatif agar data yang didapat secara kuantitatif dapat lebih representatif dijelaskan dengan adanya data secara kualitatif.

Penelitian campuran ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimana pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Kepala Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, adapun alasan penulis memilih tempat penelitian ini karena penulis ingin melihat situasi

dan kondisi di Desa Sungai Kuti lebih bisa dipahami, kemudian pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta masalah-masalah yang bermunculan, peneliti menetapkan di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak.

Tabel III.I: Jumlah Populasi dan Sampel di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina umum (Kepala Desa)	1	1	100%
2	Pembina (Kepala Dusun) Karang Taruna	3	3	100%
3	Ketua Karang Taruna	1	1	100%
4	Wakil Karang Taruna	1	1	100%
5	Sekretaris Karang Taruna	1	1	100%
6	Bendahara Karang Taruna	1	1	100%
7	Seksi Diklat	4	4	100%
8	Seksi Kessos	3	3	100%
9	Seksi Usaha Ekonomi Produktif	5	5	100%
10	Seksi Seni, Budaya dan Olahraga	5	5	100%
11	Seksi Kerohanian dan Mental	3	3	100%
12	Seksi Lingkungan Hidup	4	4	100%
13	Seksi Bidang Humas dan Kemitraan	3	3	100%
Jumlah		35	35	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 34 orang. Adapun Kepala Desa sebagai pembina umum tidak dilibatkan sebagai sampel karena merupakan subjek penelitian yang diteliti terkait pembinaannya terhadap Karang Taruna Tunas Jaya Desa Sungai Kuti. Selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada Kepala Desa, Pembina (Kepala Dusun) Karang Taruna, dan Ketua Karang Taruna.

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *sensus sampling* yaitu dengan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden (Sugiyono, 2016:85).

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti identitas responden, dan tanggapan responden tentang peminana Karang Taruna oleh Kepala Desa.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada kantor desa Sungai Kuti kecamatan kunto darusalam. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan sejarah singkat Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darusalam, keadaan geografis, struktur organisasi dan sejarah singkat Karang Taruna Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darusalam.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pihak-pihak berwenang yang memberikan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Angket (kuesioner)

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap peranan kepala desa dalam membina

Karang Taruna. Angket ini merupakan modifikasi skala likert dengan skala pengukuran:

- Efektif mendapatkan skor 3
- Kurang Efektif mendapatkan skor 2
- Tidak Efektif mendapatkan skor 1

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai

dengan kebutuhan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Karang Taruna Tunas Jaya

1. Sejarah Karang Taruna Tunas Jaya

Karang Taruna Tunas Jaya adalah organisasi sosial kemasyarakatan di Desa Sungai Kuti sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Adapun landasan hukum berdirinya Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77 / HUK / 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna

- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna
 - h. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa di Kabupaten Rokan Hulu.
 - i. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu
- Karang Taruna di Desa Sungai Kuti awal pertama didirikan pada tahun 1988 sempat mengalami kevakuman dan mulai kembali dibangkitkan dari awal kembali pada tanggal 20 juli 2018 dengan dinamakan lembaga Karang Taruna “Tunas Jaya” Desa Sungai Kuti. Adapun sifat Karang Taruna Tunas Jaya adalah organisasi sosial generasi muda yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun landasan hukum Karang Taruna Tunas Jaya ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

2. Daftar Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya

Hingga tahun 2020, Karang Taruna Tunas Jaya digerakkan oleh 35 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1. Daftar Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya Tahun 2019

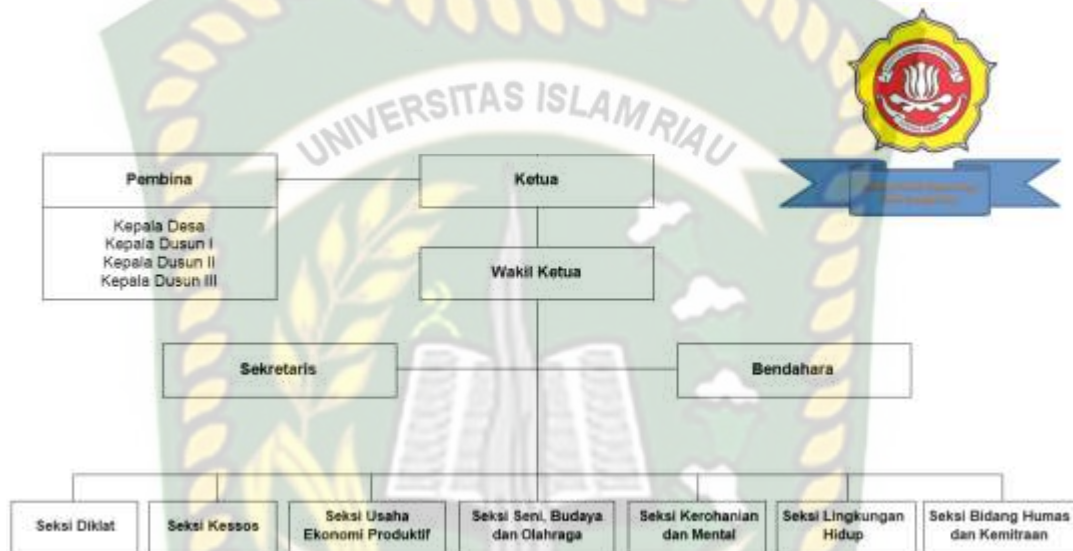
No	Jabatan	Nama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina umum (Kepala Desa)	Sadiman Efendi	1
2	Pembina (Kepala Dusun)	Zainal Imam B Syamsudin Jamari	3
3	Ketua	Suhendri Zulkifli	1
4	Wakil	Bima Ardiansyah	1
5	Sekretaris	Vitra Rahayu	1
6	Bendahara	Tri Rohma	1
7	Seksi Diklat	Galih Trio Ridwan Jogi	4
8	Seksi Kessos	Hariono Cipto Bakri	3
9	Seksi Usaha Ekonomi Produktif	Herman Narto Risky Pane Ainun Hanif	5
10	Seksi Seni, Budaya dan Olahraga	Risky Rio S Rizal M Hendrik Yati	5
11	Seksi Kerohanian dan Mental	Dono Dimas Dwi Suryo	3
12	Seksi Lingkungan Hidup	Cici Pima Frans Danu	4
13	Seksi Bidang Humas dan Kemitraan	Bambang Yoyok Danur	3
Jumlah			35

Sumber: Karang Taruna Tunas Jaya, 2020

3. Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya

Adapun seluruh keanggotaan tersebut, susunannya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini:

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Karang Taruna Tunas Jaya



Sumber: Karang Taruna Tunas Jaya, 2020

4. Tupoksi Jabatan Keanggotaan Karang Taruna Tunas Jaya

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diketahui tupoksi masing-masing tugas setiap jabatan yang tercantum di Karang Taruna Tunas Jaya Desa Sungai Kuti adalah:

1. Pembina

Adapun tupoksi Pembina Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Melakukan pembinaan umum di desa/ kelurahan.
- b. Mengkukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/ kelurahan
- c. Memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/ kelurahan

- d. Bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan kebijakan Karang Taruna Tunas Jaya.
- e. Bertugas menetapkan struktur kepengurusan Karang Taruna Tunas Jaya.
- f. Menampung aspirasi anggota dan masyarakat.
- g. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus Karang Taruna Tunas Jaya.
- h. Menjalankan fungsi kontrol kepada pengurus Karang Taruna Tunas Jaya.

2. Ketua

Adapun tupoksi Ketua Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Bertanggung jawab dalam memimpin Karang Taruna “Tunas Jaya”.
- b. Melaksanakan fungsi managerial untuk tercapainya tujuan Karang Taruna “Tunas Jaya”.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan pengurus dan anggota Karang Taruna “Tunas Jaya”.
- d. Menjalin komunikasi dengan pihak lain demi tercapainya kemajuan Karang Taruna “Tunas Jaya”.
- e. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Pelindung dan Pembina di akhir periode kepengurusan.
- f. Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Wakil atau Sekretaris atau Pengurus yang dianggap mampu mewakilinya.

g. Dalam kondisi darurat atau penting, dengan atas nama Karang Taruna “Tunas Jaya” Ketua berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang ada di Karang Taruna “Tunas Jaya”.

3. Wakil

Adapun tupoksi Wakil Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas.
- b. Menggantikan Ketua, jika Ketua sedang berhalangan.
- c. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

4. Sekretaris

Adapun tupoksi Sekretaris Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Membantu sepenuhnya tugas Ketua.
- b. Sebagai pusat informasi semua aktivitas data organisasi.
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian organisasi.
- d. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata komunikasi.
- e. Merancang, memelihara, dan melakukan perbaikan sistem aplikasi atau pembukuan yang digunakan dalam kegiatan kesekretariatan.
- f. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh berkas-berkas atau inventaris yang ada di organisasi.

g. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

5. Bendahara

Adapun tupoksi Bendahara Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola tertib keuangan organisasi.
- b. Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
- c. Mendistribusikan dana untuk seluruh kegiatan organisasi secara optimum dan proposional.
- d. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

6. Seksi Diklat

Adapun tupoksi Seksi Diklat Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja pendidikan dan pelatihan anggota.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi pendidikan dan pelatihan anggota yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.

e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

7. Seksi Kessos

Adapun tupoksi Seksi Kessos Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja kesejahteraan sosial masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi kesejahteraan sosial yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinya.
- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

8. Seksi Usaha Ekonomi Produktif

Adapun tupoksi Seksi Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja usaha ekonomi produktif masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi usaha ekonomi produktif yang akan dilakukan anggota dibawahnya.

- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.
- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

9. Seksi Seni, Budaya dan Olahraga

Adapun tupoksi Seksi Seni, Budaya dan Olahraga Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja seni, budaya dan olahraga masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi Seni, Budaya dan Olahraga yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.
- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

10. Seksi Kerohanian dan Mental

Adapun tupoksi Seksi Kerohanian dan Mental Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja kerohanian dan mental masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi kerohanian dan mental yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.
- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

11. Seksi Lingkungan Hidup

Adapun tupoksi Seksi Lingkungan Hidup Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja lingkungan hidup masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi lingkungan hidup yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.

- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua.

12. Seksi Bidang Humas dan Kemitraan

Adapun tupoksi Seksi Bidang Humas dan Kemitraan Karang Taruna Tunas Jaya adalah:

- a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan program kerja bidang humas dan kemitraan masyarakat.
- b. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan seksi bidang humas dan kemitraan yang akan dilakukan anggota dibawahnya.
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh kegiatan seksi pendidikan dan pelatihan anggota.
- d. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia di bidang yang dipimpinnya.
- e. Bertanggungjawab dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Ketua..

B. Gambaran Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

1. Geografis Desa Sungai Kuti

Desa Sungai Kuti merupakan salah satu dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah 1.145 m². Desa ini memiliki 2.005 jiwa penduduk dengan 10 RT dan 5 RW. Adapun desa ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Desa Kota Lama
- Sebelah Selatan dengan Desa Kota Lama
- Sebelah Barat dengan Desa Muara Dilam
- Sebelah Timur dengan Desa Muara Dilam

Status pemerintahan Desa Sungai Kuti adalah desa, dengan jarak dari kecamatan adalah 20 km, memiliki tanah kas desa seluas 8 Ha, pengalokasian pemakaman 2 Ha, penggunaan perkantoran seluas 1 Ha, Pasar desa 1 Ha, dan tempat rekreasi 0,25 Ha.

2. Kependudukan Desa Sungai Kuti

Adapun data jumlah penduduk di Desa Sungai Kuti tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	1.067	53%
2	Perempuan	938	47%
	Total	2.005	100%

Sumber: Monografi Desa Sungai Kuti, 2020

Jumlah penduduk Desa Sungai Kuti berdasarkan jenis kelamin mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 1.067 (53%) lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan jumlah 938 (47%). Ditinjau dari segi rentang usia, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Desa Sungai Kuti Berdasarkan Rentang Usia Tahun 2019

No	Rentang Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0 – 4	201	10%
2	5 – 9	194	10%
3	10 – 14	179	9%
4	15 – 19	160	8%
5	20 – 24	165	8%
6	25 – 29	172	9%
7	30 – 34	169	8%
8	35 – 39	166	8%
9	40 – 44	144	7%
10	45 – 49	130	6%
11	50 – 54	109	5%
12	55 – 59	71	4%
13	60 – 64	66	3%
14	≥ 65	79	4%
Total		2.005	100%

Sumber: Monografi Desa Sungai Kuti, 2020

Jumlah penduduk Desa Sungai Kuti berdasarkan rentang usia mayoritas adalah bayi usia 0 – 4 tahun dengan jumlah 201 jiwa (10%). Pertambahan penduduk ini menandakan bahwa tingkat kelahiran di Desa Sungai Kuti meningkat.

3. Sosial Desa Sungai Kuti

Adapun data sosial di Desa Sungai Kuti tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jumlah Bangunan Tahun 2019

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keagamaan - Masjid - Gereja - Musholla	2 2 3	3% 3% 5%
2	Kesehatan - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Praktek Dokter - Praktek Bidan	1 1 1 2	2% 2% 2% 3%
3	Pendidikan - TK Terpadu - SD Negeri - SD Swasta - SMP Negeri	2 1 1 1	3% 2% 2% 2%
4	Olahraga - Lapangan Sepak Bola - Lapangan Volly - Lapangan Tenis Meja - Kolam Renang	1 1 1 1	2% 2% 2% 2%
5	Perdagangan - Pasar desa - Toko - Warung - Kaki lima - Swalayan	1 23 11 3 1	2% 40% 19% 5% 2%
	Total	58	100%

Sumber: Monografi Desa Sungai Kuti, 2020

Jumlah sarana dan prasarana Desa Sungai Kuti berdasarkan jumlah bangunan terbanyak adalah toko dengan jumlah 23 unit (40%) artinya perkembangan ekonomi Desa Sungai Kuti mulai berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya.

4. Kemasyarakatan Desa Sungai Kuti

Adapun data kemasyarakatan di Desa Sungai Kuti tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5. Jumlah Kelompok Organisasi di Desa Sungai Kuti Berdasarkan Bidang Tahun 2019

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keagamaan - Majelis Taklim - Jemaat Gereja	1 1	4% 4%
2	Olahraga - Sepak bola - Tenis meja - Pencak silat - Senam - Volly	3 1 1 3 2	11% 4% 4% 11% 7%
3	Kesenian - Rebana - Kesenian daerah	7 2	25% 7%
4	Organisasi sosial - Pramuka Gudep - Karang Taruna - Kelompok PKK - Penyandang disabilitas	4 1 1 1	14% 4% 4% 4%
Total		28	100%

Sumber: Monografi Desa Sungai Kuti, 2020

Jumlah kelompok organisasi kemasyarakatan di Desa Sungai Kuti terbanyak adalah pada bidang kesenian rebana dengan jumlah 7 kelompok (25%). Hal ini berarti kesenian rebana di Desa Sungai Kuti masih aktif dan tidak tergerus perkembangan zaman.

5. Pemerintahan Desa Sungai Kuti

Adapun Pemerintahan Desa Sungai Kuti didukung oleh tenaga dengan perangkat sebagai berikut:

Tabel IV.6. Pemerintahan Desa Sungai Kuti Berdasarkan Jabatan Tahun 2019

No	Jabatan	Nama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Desa	Sadiman Efendi	1
2	Sekretaris Desa	Muktoril Fikri	1
3	Kepala Urusan - Tata Usaha dan Umum - Keuangan - Perencanaan	Sri Mulat, S.Pd Siti Nurdiyanti Eko Susanto	3
4	Kepala Seksi - Seksi Pemerintahan - Seksi Kesejahteraan - Seksi Pelayanan	Puji Lestari Pebri Setiawan Bakri Sidik	3
5	Kepala Dusun - Dusun I - Dusun II - Dusun III	Zainal Imam B Syamsudin Jamari	3
Total			11 orang

Sumber: Monografi Desa Sungai Kuti, 2020

Jumlah pejabat pemerintahan Desa Sungai Kuti adalah sebanyak 11 orang dengan Bapak Sadiman Efendi selaku Kepala Desa. Selain itu untuk memperlancar kegiatan pemerintahan didukung oleh jabatan lain.

Gambar IV.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Kuti



Sumber: Karang Taruna Tunas Jaya, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas penelitian ini lebih lanjut guna untuk menganalisis pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu kiranya diketahui identitas responden yaitu 34 orang anggota Karang Taruna Tunas Jaya sebagai berikut.

1. Jenis Kelamin Responden

Analisis demografik pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden. Analisis terhadap data jenis kelamin responden perlu untuk dilakukan karena adanya perbedaan penting antara pria dan wanita. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dan selektivitas dalam mengisi angket. Adapun hasil analisisnya terhadap data jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	28	82,4
2	Perempuan	6	17,6
	Jumlah	34	100

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 28

orang (82,4%) sedangkan sisanya responden perempuan dengan jumlah 6 orang (17,6%).

2. Usia Responden

Analisis demografik kedua dilakukan terhadap data usia responden. Analisis terhadap data usia responden perlu dilakukan karena adanya perbedaan kebutuhan dan pandangan responden dalam pengisian angket. Adapun hasil analisisnya disajikan dalam tabel V.2 berikut ini.

Tabel V.2 Distribusi Usia Responden

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	15 – 20	14	41,2
2	21 – 25	15	44,1
3	26 – 30	1	2,9
4	≥ 31	4	11,8
	Jumlah	34	100

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 21 – 25 tahun dengan jumlah 15 orang (44,1%). Sedangkan sisanya berusia 15 – 20 tahun dengan jumlah 14 orang (41,2%), berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 1 orang (11,8%) dan berusia ≥ 31 tahun dengan jumlah 4 orang (11,8%).

3. Pendidikan Responden

Analisis demografik ketiga dilakukan terhadap data pendidikan responden. Analisis mengenai pendidikan penting untuk dianalisis karena setiap jenis pendidikan membebaskan tuntutan berbeda

terhadap seseorang dan bahwa setiap orang harus memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pendidikan tersebut. Adapun hasil analisisnya disajikan dalam tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3 Distribusi Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	1	2,9
2	SMP	10	29,4
3	SMA	21	61,8
4	Sarjana	2	5,9
	Jumlah	34	100

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan SMA dengan jumlah 21 orang (61,8%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 1 orang (2,9%), tamatan SMP dengan jumlah 10 orang (29,4%), dan tamatan Sarjana dengan jumlah 2 orang (5,9%).

B. Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang analisis data pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan hasil penyebaran angket berjumlah 22 item yang disebarkan kepada 34 orang anggota Karang Taruna Tunas Jaya hasilnya sebagai berikut.

1. Indikator Penayadaran

Penayadaran adalah tahap pertama dari pembinaan yang meliputi pembentukan perilaku sadar, peduli dan peningkatan kapasitas diri.

Berdasarkan hasil wawancara terkait penayadaran diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Harus ada penayadaran. Jadi salah satu cara saya memberikan nasihat, saran dan wejangan saat rapat. Selain itu juga memang untuk karang taruna harus dilibatkan untuk kegiatan swakelola maupun kegiatan yang dilakukan misal rapat, anggota karang taruna wajib ada. Kayak pembina kadus kan, mereka pasti ikut kalau musyawarah.” (wawancara Sadiman Efendi, Kepala Desa Sungai Kuti sekaligus Pembina Umum Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Sungai Kuti memberikan nasihat dan saran khususnya pada saat rapat dalam membentuk penayadaran para anggotanya. Keterlibatan pengurus dan anggota karang taruna misalnya dalam musyawarah yang dilakukan desa. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“kalau Bapak Kades itu ada cuman sifatnya beliau sebagai pembina umum, kalau yang lebih sering memberikan nasehat dan lain-lain itu ya kami dan ketua karang taruna tentu.” (wawancara Syamsudin, Kepala Dusun II sekaligus Pembina Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa intensitas pemberian nasehat dan saran lebih sering dilakukan pembina (Kepala Dusun) dibandingkan pembina umum

(Kepala Desa). Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Meskipun ada tapi ya sifatnya pas rapat aja, kalau nggak rapat ya kades mana ada. Harusnya dalam setiap kegiatan semua pengurus itu ikut biar motivasi anggotanya tinggi, mau bergerak, karna kami yang pengurus aja kadang-kadang bingung mau buat kegiatan apa nggak ada yang bisa ngasih saran. Pelatihan ada tapi itu sudah lama sekali, Kepala Desa sebelumnya bukan yang sekarang.” (wawancara Suhendri Zulkifli, Ketua Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa intensitas penyadaran yang dilakukan pembina umum yaitu Kepala Desa Sungai Kuti kurang efektif, hal ini disebabkan karena pembina umum hanya hadir saat musyawarah tahunan saja sedangkan untuk kegiatan rutin karang taruna pembina umum tidak terlalu aktif terlibat.

a. Pembentukan perilaku sadar

Pembentukan perilaku sadar berkaitan dengan nasihat maupun saran yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan serta intensitas pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pembentukan perilaku sadara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.4. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Pembentukan Perilaku Sadar

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasihat yang diberikan Kepala Desa agar anggota karang taruna tunas jaya aktif dalam kegiatannya	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0%)	34 (100%)	Efektif
Intensitas melibatkan anggota karang taruna oleh Kepala Desa dalam setiap kegiatan yang diadakan di desa	9 (26,5%)	22 (64,7%)	3 (8,8%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Rata-rata	17	16	1	34	Kurang Efektif
Persentase	(50,0%)	(47,1%)	(2,9%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui pembentukan perilaku sadar rata-rata responden 17 orang (50,0%) menjawab efektif, 16 orang (47,1%) menjawab kurang efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka ditarik kesimpulan anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan pembentukan perilaku sadar tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata jawaban 17 orang (48,5%).

b. Peduli

Peduli merupakan sikap keberpihakan pimpinan kepada bawahan serta melibatkan berbagai bentuk perhatian. Berdasarkan

hasil jawaban kuesioner terhadap peduli menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.5. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Peduli

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepedulian yang ditunjukkan oleh Kepala Desa saat anggota karang taruna tunas jaya dalam melakukan kegiatannya	23 (67,6%)	8 (23,5%)	3 (8,8%)	34 (100%)	Efektif
Partisipasi dana yang diberikan untuk upaya memfasilitasi kegiatan karang taruna tunas jaya oleh kepala desa	5 (14,7%)	20 (58,8%)	9 (26,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Rata-rata	14	14	6	34	Kurang Efektif
Persentase	(41,2%)	(41,2%)	(17,6%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala desa melalui kepedulian rata-rata responden 14 orang (41,2%) menjawab efektif, 14 orang (41,2%) menjawab kurang efektif, dan 6 orang (17,6%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan kepedulian tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata jawaban 17 orang (48,5%).

c. Peningkatan kapasitas diri

Peningkatan kapasitas diri adalah upaya yang dilakukan pimpinan untuk memberikan pelatihan demi meningkatkan kompetensi bawahannya serta pembentukan program yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap peningkatan kapasitas diri menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.6. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Peningkatan Kapasitas Diri

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelatihan yang diadakan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan keterampilan anggota karang taruna tunas jaya	4 (11,8%)	22 (64,7%)	8 (23,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Program yang dijalankan kepala desa agar generasi muda di desa sungai kuti ikut dalam anggota karang taruna tunas jaya	23 (67,6%)	8 (23,5%)	3 (8,8%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	13	15	6	34	Kurang Efektif
Persentase	(38,2%)	(44,1%)	(17,6%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala desa melalui peningkatan kapasitas diri rata-rata responden 13 orang (38,2%) menjawab efektif, 15 orang (44,1%) menjawab kurang efektif, dan 6 orang (17,6%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peningkatan kapasitas diri tergolong kurang efektif dengan rata-rata jawaban 15 orang (44,1%).

Dari hasil observasi diketahui bahwa anggota Karang Taruna Tunas Jaya merasa Intensitas melibatkan anggota oleh Kepala Desa dalam setiap kegiatan yang diadakan di desa masih rendah dan Partisipasi dana yang diberikan untuk upaya memfasilitasi kegiatan karang taruna juga masih sangat terbatas. Pelatihan yang diadakan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan keterampilan anggota karang taruna sangat jarang dilakukan.

2. Indikator Transformasi

Transformasi adalah tahap kedua dari pembinaan yang meliputi wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar, dan berperan dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait transformasi diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk wawasan pengetahuan ya kami menjalankan apa yang kami miliki saat ini, memang untuk fasilitas seperti perpustakaan desa kami belum ada seperti desa lain, tapi di rencana kami untuk pembangunan itu akan diwujudkan dalam waktu dekat. Kalau masalah kecakapan ya di desa kita sama-sama tahu pendidikan para anggota karang taruna itu tidak seperti di kota, masih banyak yang tamat SD dan SMP,SMA saja tetapi tetap kembali mengacu ke misi karang taruna untuk mensejahterakan sosial” (wawancara Sadiman Efendi, Kepala Desa Sungai Kuti

sekaligus Pembina Umum Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya Kepala Desa Sungai Kuti dalam mewujudkan transformasi melalui peningkatan wawasan pengetahuan belum maksimal. Hal ini disebabkan karena fasilitas perpustakaan desa belum dapat diwujudkan hingga saat ini, akibatnya anggota karang taruna tidak mendapatkan peningkatan wawasan ditambah faktor kecakapan yang sebagian besar pendidikan para anggota adalah tamatan SMP dan SMA. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada kalau untuk peningkatan wawasan para anggota, saya juga merasa memang para anggota butuh peningkatan wawasan, ya memang ada hp misal untuk nyari-nyari kegiatan karang taruna cuman kan tidak terdokumentasikan dengan baik, jadi harus ada yang namanya perpustakaan desa.” (wawancara Syamsudin, Kepala Dusun II sekaligus Pembina Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa belum adanya fasilitas perpustakaan desa terbukti menghambat peningkatan wawasan pengetahuan dan kecakapan para anggota Karang Taruna Tunas Jaya. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada peningkatan apalagi keterampilan dasar misalnya ya wirid dan olahraga saja, dari dulu selalu itu. Padahal harusnya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, cuman ya itu tadi kalau kami saja yang gerak tanpa ada dukungan dana tentu tidak mungkin. Kalau ada dana pasti bisa aktif, karena kalau ada dana mau bikin acara apa bebas, semakin solid jika banyak kegiatan. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, tahun

ini jalan, tahun besok udah nggak jalan. Seringnya disini seperti itu. ” (wawancara Suhendri Zulkifli, Ketua Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terhambatnya tranformasi disebabkan karena kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya hanya itu-itu saja setiap tahun. Bahkan, banyak kegiatan yang hanya berjalan di tahun pada saat diberlakukan, sedangkan ketika memasuki tahun selanjutnya kegiatan tersebut berhenti.

a. Wawasan pengetahuan

Wawasan pengetahuan berkaitan dengan fasilitas yang disediakan pimpinan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan kerja para bawahannya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap wawasan pengetahuan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.7. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Wawasan Pengetahuan

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitas yang disediakan Kepala Desa untuk meningkatkan wawasan pengetahuan anggota karang taruna tunas jaya	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0%)	34 (100%)	Efektif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program peningkatan wawasan pengetahuan melalui perpustakaan desa yang dijalankan Kepala Desa di Desa Sungai Kuti	23 (67,6%)	9 (26,5%)	2 (5,9%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	23	10	1	34	Efektif
Persentase	(67,6%)	(29,3%)	(2,9%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui wawasan pengetahuan rata-rata responden 23 orang (67,6%) menjawab efektif, 10 orang (29,3%) menjawab kurang efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan wawasan pengetahuan tergolong efektif dengan rata-rata jawaban 23 orang (67,6%).

b. Kecakapan

Kecakapan adalah kepandaian yang dimiliki seseorang atau kemahiran pimpinan dalam mengkoordinasikan serta komunikasi yang efektif. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap kecakapan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.8. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Kecakapan

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keterampilan berkomunikasi yang ditunjukkan Kepala Desa terhadap anggota Karang Taruna Tunas Jaya	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Tingkat pengetahuan Kepala Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum berdirinya Karang Taruna Tunas Jaya	4 (11,8%)	22 (64,7%)	8 (23,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Rata-rata	14	16	4	34	Kurang Efektif
Persentase	(41,2%)	(47,1%)	(11,8%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui kecakapan rata-rata responden 14 orang (41,2%) menjawab efektif, 16 orang (47,1%) menjawab kurang efektif, dan 4 orang (11,8%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan kecakapan tergolong kurang efektif dengan rata-rata jawaban 16 orang (47,1%).

c. Keterampilan dasar

Keterampilan dasar berkaitan dengan penilaian tingkat seluruh elemen organisasi yang berkaitan dengan kinerja dari program-program organisasi itu sendiri. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap keterampilan dasar menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.9. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Keterampilan Dasar

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan yang dibina oleh Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan agama masyarakat melalui wirid yasin	24 (70,6%)	9 (26,5%)	1 (2,9%)	34 (100%)	Efektif
Kegiatan yang dibina oleh Kepala Desa dalam upaya pemberdayaan jasmani masyarakat melalui kegiatan olahraga	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	24	9	1	34	Efektif
Persentase	(70,6%)	(26,5%)	(2,9%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui keterampilan dasar rata-rata responden 24 orang (70,6%) menjawab efektif, 9 orang (26,5%) menjawab kurang efektif, dan 1 orang (2,9%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan

yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan keterampilan dasar tergolong efektif dengan rata-rata jawaban 24 orang (70,6%).

d. Berperan dalam pembangunan

Berperan dalam pembangunan merupakan kontribusi pimpinan dalam membangun kegiatan organisasi itu sendiri, hal tersebut juga menjadi salah satu penilaian efektivitas pembinaan pemimpin secara keseluruhan. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap berperan dalam pembangunan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.10. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Berperan Dalam Pembangunan

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Seberapa jauh upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Kuti agar anggota karang taruna tunas jaya berperan dalam pembangunan desa	3 (8,8%)	22 (64,7%)	9 (26,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Kemampuan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Kuti demi membina generasi muda	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	14	15	5	34	Kurang Efektif
Persentase	(41,2%)	(44,1%)	(13,2%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui berperan dalam pembangunan rata-rata responden 14 orang (41,2%) menjawab

efektif, 15 orang (44,1%) menjawab kurang efektif, dan 5 orang (13,2%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan berperan dalam pembangunan tergolong kurang efektif dengan rata-rata jawaban 15 orang (44,1%).

Dari hasil observasi diketahui bahwa anggota Karang Taruna Tunas Jaya merasa tingkat pengetahuan Kepala Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum berdirinya Karang Taruna Tunas Jaya masih belum optimal dan upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Kuti agar anggota karang taruna tunas jaya berperan dalam pembangunan desa juga masih belum optimal.

3. Indikator Peningkatan

Peningkatan adalah tahap akhir dari pembinaan yang meliputi inisiatif, inovatif, kemandirian dan pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara terkait peningkatan diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk inisiatif saya rasa jarang mereka lakukan, adapun ya kalau pas momen pas saja misalnya pas bulan ramadhan bagi-bagi takjil, waktu bencana asap dulu bagi-bagi masker. Cuman untuk inisiatif yang lain nggak ada apalagi untuk buat kegiatan rutin. Kemandirian mereka itu sangat penting, karena mereka organsiasi sendiri kami yang membina dan mengayomi. Harusnya mereka yang inisiatif bikin acara apa, dan apa program yang mau dikembangkan. Tentu setelah ada itu baru

kami pertimbangkan, melihat dana, fungsi dan misinya sama atau sejalan nggak dengan pemerintah desa” (wawancara Sadiman Efendi, Kepala Desa Sungai Kuti sekaligus Pembina Umum Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa upaya Kepala Desa Sungai Kuti dalam mengembangkan Karang Taruna Tunas Jaya belum maksimal. Hal ini disebabkan karena Pembina Umum lebih mengharapkan inisiatif dan inovasi berasal dari para pengurus dan anggota karang taruna itu sendiri, hal ini disebabkan karena kemandirian sangat diharapkan oleh pembina umum kepada mereka. Sifat pemerintah desa adalah sebagai penindaklanjutan, memfasilitasi dan mengayomi setiap ide maupun rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tetap mengacu pada kemandirian para pengurus dan anggota Karang Taruna Tunas Jaya itu sendiri. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Inisiatif yang bagaimana ya susah untuk dilakukan di desa, inisiatif apalagi inovasi itu kan hal baru, misalnya kami tunas jaya ingin membuat suatu program baru yang belum pernah dijalankan oleh karang taruna desa lain di indonesia, lah sementara kami nggak punya wawasan untuk melihat apa-apa saja yang bisa kami contek istilahnya. Jadi ya harus ada timbal balik juga, jangan sampai kami bikin program ini itu tapi dari desa nggak support, bagus pun program yang kami buat belum tentu para anggota ini mau untuk bergerak.” (wawancara Syamsudin, Kepala Dusun II sekaligus Pembina Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa para anggota Karang Taruna Tunas Jaya kurang

memiliki inisiatif dan inovasi terkait upaya pengembangan program. Generasi pemuda dan pemudi yang mulai mengikuti perkembangan teknologi dan zaman seharusnya mampu menyediakan inisiatif dan inovasi sendiri mengingat kemudahan mereka untuk mengakses internet. Para anggota Karang Taruna Tunas Jaya inilah yang seharusnya berperan penting dalam mengajukan ide, saran dan harapan yang diharapkan mampu menjadi inisiatif dan inovasi baru agar kegiatan mereka semakin aktif. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya rasa keberanian mereka untuk mengajukan ide dan saran itu masih malu-malu. Kebanyakan yang ikut-ikutan saja, itu ada yang sehari aktif besoknya udah nggak pernah ikut lagi alasannya kerja, ini itu, padahal kita sudah pernah rapat sudah ada penunjukkan siapa-siapa anggota tapi tetap saja ditunjuk pun masih banyak yang nggak mau. Jadi penting untuk merevolusi mental mereka ini agar berani berinisiatif dan berinovasi demi pengembangan Karang Taruna Tunas Jaya” (wawancara Suhendri Zulkifli, Ketua Karang Taruna Tunas Jaya, tanggal 30 November 2020).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa terhambatnya upaya peningkatan disebabkan karena rendahnya inisiatif dan inovatif para anggota Karang Taruna Tunas Jaya, sehingga masih banyak anggota yang terkesan pasif dan ikut-ikutan tanpa berani mengajukan ide dan saran demi pengembangan Karang Taruna Tunas Jaya.

a. Inisiatif

Inisiatif adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Dengan kata lain, inisiatif adalah bentuk

kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi suatu hal. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap inisiatif menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.11. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Inisiatif

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inisiatif yang dilakukan Kepala Desa agar karang taruna tunas jaya aktif kembali	2 (5,9%)	21 (61,8%)	11 (32,4%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Kebijakan yang Kepala Desa Sungai Kuti laksanakan terkait penyesuaian kegiatan pada masa pandemi	4 (11,8%)	21 (61,8%)	9 (26,4%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Rata-rata	3 (8,8%)	21 (61,8%)	10 (29,4%)	34 (100%)	Kurang Efektif

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui inisiatif rata-rata responden 3 orang (8,8%) menjawab efektif, 21 orang (61,8%) menjawab kurang efektif, dan 10 orang (29,4%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan inisiatif tergolong kurang efektif dengan rata-rata jawaban 21 orang (61,8%).

b. Inovatif

Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan kegiatan nyata yang baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap inovatif menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.12. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Inovatif

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inovasi Kepala Desa agar karang taruna tunas jaya bisa kembali aktif tanpa harus vakum lagi	6 (17,6%)	22 (64,7%)	6 (17,6%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Inovasi yang dilakukan Kepala Desa Sungai Kuti untuk memaksimalkan kegiatan karang taruna seperti pembagian masker saat asap dan pembagian takjil saat bulan ramadhan	23 (67,6%)	11 (32,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	15	16	3	34	Kurang Efektif
Persentase	(44,1%)	(47,1%)	(8,8%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui inovatif rata-rata responden 15 orang (44,1%) menjawab efektif, 16 orang (47,1%) menjawab kurang efektif, dan 3 orang (8,8%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan inovatif tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata jawaban 16 orang (47,1%).

c. Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah secara independen. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap kemandirian menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.13. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Kemandirian

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepala Desa mempercayakan sepenuhnya kegiatan karang taruna kepada para anggotanya	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Partisipasi dan keterlibatan Kepala Desa dalam setiap kegiatan yang sedang dijalankan oleh karang taruna tunas jaya	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	24	10	0	34	Efektif
Persentase	(70,6%)	(29,4%)	(0,0%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui kemandirian dasar rata-rata responden 24 orang (70,6%) menjawab efektif, 10 orang (29,4%) menjawab kurang efektif, dan tidak ada satupun 0 orang (0,0%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan kemandirian tergolong efektif dengan rata-rata jawaban 24 orang (70,6%).

d. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual dan kapabilitas dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pengembangan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel V.14. Frekuensi Tanggapan Anggota Karang Taruna Terhadap Pembinaan Kepala Desa Berdasarkan Pengembangan

Pernyataan	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program yang dijalankan Kepala Desa agar Karang Taruna Tunas Jaya semakin berkembang	4 (11,8%)	21 (61,7%)	9 (26,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebutuhan para anggota karang taruna terhadap peran kepala desa sebagai pembina	3 (8,8%)	22 (64,7%)	9 (26,5%)	34 (100%)	Efektif
Rata-rata	4	22	9	34	Kurang Efektif
Persentase	(10,3%)	(63,2%)	(26,5%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembinaan Kepala Desa melalui pengembangan rata-rata responden 4 orang (10,3%) menjawab efektif, 22 orang (63,2%) menjawab kurang efektif, dan 9 orang (26,5%) menjawab tidak efektif.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota karang taruna tunas jaya menganggap pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan pengembangan tergolong Kurang Efektif dengan rata-rata jawaban 22 orang (63,2%).

Dari hasil observasi diketahui bahwa anggota Karang Taruna Tunas Jaya merasa inisiatif yang dilakukan Kepala Desa agar karang taruna tunas jaya aktif kembali belum optimal, tidak adanya kebijakan yang Kepala Desa Sungai Kuti laksanakan terkait penyesuaian kegiatan pada masa pandemi, Tidak adanya inovasi Kepala Desa untuk jangka panjang agar Karang Taruna Tunas Jaya bisa kembali aktif tanpa harus vakum lagi, Program yang dijalankan Kepala Desa agar Karang Taruna Tunas Jaya hanya itu-itu saja, dan kebutuhan para anggota karang taruna terhadap peran kepala desa sebagai

pembina umum masih Kurang Efektif karena selama ini mereka lebih banyak mengandalkan kemandirian organisasi sendiri.

4. Rekapitulasi Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel V.15. Rekapitulasi Proses Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Indikator	Sub indikator	Efektif	Kurang Efektif	Tidak Efektif	Jumlah	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyadaran	Pembentukan perilaku sadar	17 (50,0%)	16 (47,1%)	1 (2,9%)	34 (100%)	Kurang Efektif
	Peduli	14 (41,2%)	14 (41,2%)	6 (17,6%)	34 (100%)	Kurang Efektif
	Peningkatan kapasitas diri	13 (38,2%)	15 (44,1%)	6 (17,6%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Transformasi	Wawasan pengetahuan	23 (67,6%)	10 (29,3%)	1 (2,9%)	34 (100%)	Efektif
	Kecakapan	14 (41,2%)	16 (47,1%)	4 (11,8%)	34 (100%)	Kurang Efektif
	Keterampilan dasar	24 (70,6%)	9 (26,5%)	1 (2,9%)	34 (100%)	Efektif
	Berperan dalam pembangunan	14 (41,2%)	15 (44,1%)	5 (13,2%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Peningkatan	Inisiatif	3 (8,8%)	21 (61,8%)	10 (29,4%)	34 (100%)	Kurang Efektif
	Inovatif	15 (44,1%)	16 (47,1%)	3 (8,8%)	34 (100%)	Kurang Efektif
	Kemandirian	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0,0%)	34 (100%)	Efektif
	Pengembangan	4 (10,3%)	22 (63,2%)	9 (26,5%)	34 (100%)	Kurang Efektif
Rata-rata		14,91	15,00	4,09	34	Kurang Efektif
Persentase		(43,9%)	(44,1%)	(4,09%)	(100%)	

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala

Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan persentase 44,1% tergolong kurang efektif.

Selain itu jika ditinjau secara spesifik indikator pembentukan perilaku sadar mendapatkan persentase 48,5% tergolong kurang efektif, peduli mendapatkan persentase 41,2% tergolong kurang efektif, peningkatan kapasitas diri mendapatkan persentase 44,1% tergolong kurang efektif, wawasan pengetahuan mendapatkan persentase 67,6% tergolong efektif, kecakapan mendapatkan persentase 47,5% tergolong kurang efektif, keterampilan dasar mendapatkan persentase 70,6% tergolong efektif, berperan dalam pembangunan mendapatkan persentase 44,1% tergolong kurang efektif, inisiatif mendapatkan persentase 61,8% tergolong efektif, inovatif mendapatkan persentase 47,1% tergolong kurang efektif, kemandirian mendapatkan persentase 70,6% tergolong efektif, pengembangan mendapatkan persentase 63,2% tergolong kurang efektif.

C. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya Oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

1. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan dokumentasi AD/ ART Karang Taruna Tunas Jaya 2018-2021 pada bab VIII pasal 13 menyebutkan bahwa keuangan Karang Taruna Tunas Jaya diperoleh dari iuran anggota Karang Taruna, usaha sendiri yang diperoleh secara syah, bantuan masyarakat yang tidak mengikat, bantuan/ subsidi dari Pemerintah, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan operasional Karang Taruna Tunas Jaya ini memang tertuang dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019 tentang standar biaya kegiatan pemerintah desa di Kabupaten Rokan Hulu menyebutkan bantuan operasional Karang Taruna dianggarkan Rp.7.500.000,- /tahun yang digunakan untuk alat tulis kantor, fotokopi, makan dan minum rapat, dan bantuan transportasi keKabupaten.

Hal ini tentu berbeda dengan di tahun 2013, dimana berdasarkan berita harian online yang diakses pada situs goriau.com menyebutkan pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendukung Karang Taruna dengan kondisi anggaran sesuai kebutuhan dengan masing-masing desa/kelurahan mendapatkan Rp.10.000.000,- dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk setiap tahunnya. Artinya ada penurunan bantuan biaya operasional untuk kegiatan Karang Taruna di tahun 2020 ini.

Sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu pasal 1 ayat 18 menyebutkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti kebijakan Kepala Desa dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya perlu ditingkatkan dengan meningkatkan semua aspek yang mencakup dalam organisasi Karang Taruna Tunas Jaya.

2. Rendahnya Partisipasi Pemuda dan Pemudi Desa Sungai Kuti

Rendahnya penurunan partisipasi dan minat masyarakat baik pemuda dan pemudi remaja terhadap partisipasi dalam berorganisasi karang taruna. Masih banyak pemuda yang tidak peduli atau tidak tanggap oleh kegiatan-kegiatan pemuda. Selain itu banyak pemuda yang bekerja di luar kota atau meneruskan pendidikannya di luar daerah, sehingga membuat mereka tak acuh terhadap kegiatan Karang Taruna. Para pemudi yang memilih untuk menikah di usia dini juga terkesan pasif terhadap kegiatan Karang Taruna. Pada remaja yang berdomisili di Desa Sungai Kuti menganggap, program yang dijalankan Karang Taruna Tunas Jaya ketinggalan zaman.

Remaja-remaja setempat yang masih sekolah mereka disibukkan dengan aktivitas sekolah dan ekstrakurikuler sehingga tidak memiliki waktu yang cukup. Adanya globalisasi mengakibatkan minat remaja untuk menuntut ilmu diluar daerah semakin meningkat sehingga mengurangi jumlah remaja di desa tersebut, ketiga adanya perubahan perspektif bahwa setelah sekolah mereka dituntut untuk segera bekerja sehingga banyaknya pemuda asli daerah ini bekerja maupun merantau keluar kota mengakibatkan berkurangnya baik minat maupun jumlah pemuda untuk berorganisasi. Adanya kemunculan budaya individualistis di kalangan remaja yang menyebabkan mereka lebih memilih untuk sibuk dengan kegiatannya masing-masing.

Dari hasil observasi juga diketahui pada Undangan yang disebarakan Anggota Karang Taruna tanggal 20 Juli 2018 perihal Rapat Pembentukan

Seksi-Seksi Karang Taruna Tunas Jaya, masih banyak pemuda dan pemudi yang tidak hadir. Saat penunjukan seksi-seksi pun masih banyak para anggota rapat yang tidak mau ditunjuk dan melimpahkannya kepada orang lain.

3. Efek Pandemi Covid19

Dengan adanya wabah Covid19 yang sudah berlangsung kurang lebih pada bulan Februari 2020 menyebabkan banyak kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya yang ditiadakan mengingat adanya instruksi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diamanatkan oleh Pemkab Rokan Hulu pada setiap Kecamatannya.

Beberapa kegiatan rutin yang dahulunya sering diadakan oleh Karang Taruna Tunas Jaya terpaksa ditiadakan, misalnya wirid mingguan. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menghindari dan menekan penyebaran virus covid19 agar tidak menimbulkan korban terjangkit bertambah.

Akibatnya Kepala Desa tidak dapat melakukan pembinaan karena mayoritas Kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya dilangsungkan dengan cara bersama dan melibatkan orang banyak, perlahan-lahan kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya mulai meredup ditambah dengan faktor-faktor lainnya. Kepala Desa Sungai Kuti saat ini lebih berorientasi pada perbaikan dan penyesuaian sektor pelayanan saja.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Proses pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu secara keseluruhan hanya mendapatkan persentase sebesar 44,1% tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena masih adanya aspek Kepala Desa yang belum optimal yaitu pembentukan perilaku sadar, peduli, peningkatan kapasitas diri, kecakapan, berperan dalam pembangunan, inisiatif, inovatif, dan pengembangan.
2. Faktor penghambat dalam pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi pemuda dan pemudi Desa Sungai Kuti dan Efek pandemi Covid19.

B. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk peningkatan pembinaan Karang Taruna Tunas Jaya oleh Kepala Desa di Desa Sungai Kuti Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu adalah:

1. Kepala Desa disarankan untuk memprioritaskan penggunaan ADD (Alokasi Dana Desa) kepada Karang Taruna Tunas Jaya. Hal ini disebabkan karena sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2017 pasal 1 ayat 18 menyebutkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Artinya kebijakan Kepala Desa dalam mengalokasikan dana desa untuk kegiatan Karang Taruna Tunas Jaya perlu ditingkatkan dengan meningkatkan semua aspek yang mencakup dalam organisasi Karang Taruna Tunas Jaya.
2. Pemuda dan pemudi Desa Sungai Kuti disarankan untuk lebih berpartisipasi dengan ikut bergabung di Karang Taruna Tunas Jaya. Hal ini disebabkan karena Karang Taruna Tunas Jaya mempunyai fungsi mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Cohen, W.A. (2002). *Ilmu Kepemimpinan*. Jakarta: Prenhallindo.
- Creswell, J.W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Bina Karang Taruna. (2005). *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*. Departemen Sosial RI Press.
- Duha, T. (2018). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Hakim, Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2011). *Pusat Bahasa*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Andi.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rakhmat, K. (2018). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ratminto. 2016. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. (2012). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Askara.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016.) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta

- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susiani, D. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H.N.S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Terry, George, R. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. (2014). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Prenadamedia Group Kencana.
- Wibowo. (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjopranoto. (2012). *Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif*. Jurnal Respon Publik, Volume 13 Nomor 4, 30-38.
- Winarno, B. (2013). *Komparasi Organisasi Pedesaan Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: IKAPI.
- Winarso. (2007). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wirman. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Zulkifli. (2014). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Dokumen dan Rujukan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2012. Pekanbaru: UIR Press.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 28 tahun 2019 tentang standar biaya kegiatan pemerintah desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau